

- Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Nomor 2012, Tambahan Lembar Negara Nomor 215);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Nomor 191 Tahun 2013);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 676);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah rovinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
 12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pada DPMPTSP Provinsi Bali.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, meliputi jenis pelayanan :
- a. Jasa, dan
 - b. Pelayanan Administrasi.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatuwajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT : Setiap ketidakpatuhan staf terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas ini akan dilaksanakan evaluasi oleh Instansi terkait dan jika ditemukan ketidakpatuhan yang termasuk pelanggaran disiplin akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 15 Pebruari 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali



Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana
Pembina Utama Muda
NIP. 19631022 199108 1 001



ပိတၢ်စီုစဉ်းပိတၢ်တၢ်ပိတၢ်

PEMERINTAH PROVINSI BALI

စီုစဉ်းပိတၢ်တၢ်ပိတၢ်တၢ်ပိတၢ်တၢ်ပိတၢ်တၢ်ပိတၢ်

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

တၢ်ပိတၢ်တၢ်ပိတၢ်တၢ်ပိတၢ်တၢ်ပိတၢ်တၢ်ပိတၢ်

JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA (80235), TELEPON (0361)243804

WEBSITE: www.dpmptsp.baliprov.go.id, Email: dpmptsp@baliprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU

Ditetapkan di Bali

Pada tanggal 15 Pebruari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali



Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana

Pembina Utama Muda

NIP. 19631022 199108 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI NOMOR 807 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DPMPTSP
PROVINSI BALI

Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi Kurang dari 6.000 m³ (Enam Ribu Meter Kubik) per tahun
2. Izin Usaha Industri Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)
3. Izin Usaha Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO)
4. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) di Tahura
5. Izin Usaha Pemanfaatan Air dan / atau Energi Air (IUPA dan / atau IUPEA) di Tahura
6. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJLWAPSWA) pada Hutan Lindung
7. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJLWA-PSWA) pada Hutan Produksi
8. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada Hutan Produksi
9. Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan UMKM dan BUMD
10. Izin Lingkungan
11. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Provinsi
12. Izin Pembudidayaan Ikan
13. Izin kapal Pengangkut Hasil Budidaya Ikan
14. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Tangkap
15. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
16. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon (SIPI Andon)
17. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
18. Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pengolahan, Pengumpulan dan Pengangkutan Hasil Perikanan
19. Izin Lokasi Wisata Bahari
20. Izin Lokasi Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut.
21. Izin Lokasi Reklamasi.
22. Izin Lokasi Pemanfaatan Air Laut Dalam.
23. Izin Lokasi Pemasangan Pipa Bawah Laut.
24. Izin Lokasi Pemasangan Kabel Bawah Laut
25. Izin Lokasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi
26. Izin Lokasi Pertambangan dan Energi Di Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil.
27. Izin Pengelolaan Lokasi Wisata Bahari
28. Izin Pengelolaan Pemasangan Pipa Bawah Laut
29. Izin Pengelolaan Pemasangan Kabel Bawah Laut
30. Izin Pengelolaan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi
31. Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan Kebutuhan Penggunaan Kendaraan (Kuota)

32. Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
33. Penerbitan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Sewa Khusus
34. Perpanjangan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Sewa Khusus.
35. Penerbitan Peremajaan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus
36. Penambahan Kuota Angkutan Sewa Khusus (ASK)
37. Pengendalian Kuota Angkutan Sewa Khusus (ASK)
38. Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Taksi dan Penggunaan Kendaraan /Kuota Pelayanan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Taksi)
39. Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Taksi dan Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Taksi)
40. Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Taksi)
41. Perpanjangan Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Taksi)
42. Peremajaan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Taksi)
43. Perpanjangan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Taksi)
44. Rekomendasi Perubahan Sifat Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Taksi)
45. Izin Penyelenggaraan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Pelayanan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dan Penggunaan Kendaraan
46. Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Kartu Pengawasan (KP)
47. Penerbitan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).
48. Penerbitan Kartu Pengawas (KP) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
49. Peremajaan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).
50. Perpanjangan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
51. Rekomendasi Perubahan Sifat Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
52. Izin Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) dan Penggunaan Kendaraan (Kuota).
53. Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) dan Kartu Pengawasan (KP).
54. Penerbitan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP).
55. Perpanjangan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP)
56. Peremajaan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Taksi)
57. Perpanjangan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP)
58. Rekomendasi Perubahan Sifat Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP)
59. Izin Koperasi simpan pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)
60. Izin Pembukaan kantor cabang Pembantu
61. Izin Pembukaan kantor cabang
62. Izin Pembukaan kantor Kas
63. Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)
64. Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) Lintas Provinsi yang berdomisili di Provinsi Bali
65. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)
66. Surat Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
67. Rekomendasi Pengangkatan Anak secara Adat Kebiasaan Setempat
68. Rekomendasi Pengangkatan Anak Secara Peraturan Perundang Undangan
69. Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Umum

70. Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Umum
71. Izin Seni Budaya Untuk Pariwisata
72. Validasi Pembayaran Notifikasi (Perpanjangan IMTA)
73. Surat Keterangan K3 Bejana Tekan/ Tangki Timbun
74. Surat Keterangan K3 Instalasi Pipa Bertekanan
75. Surat Keterangan K3 Instalansi Listrik
76. Surat Keterangan K3 Instalasi Penyalur Petir
77. Surat Keterangan K3 Elevator
78. Surat Keterangan K3 Escalator
79. Surat Keterangan K3 Instalasi Proteksi Kebakaran
80. Surat Keterangan K3 Pesawat Angkat dan Angkut)
81. Surat Keterangan K3 Pesawat Tenaga dan Produksi
82. Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan (Baru)
83. Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan (Perubahan Kelompok Produk)
84. Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan (Perubahan Alamat)
85. Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan (Pergantian Pimpinan)
86. Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan (Pergantian Penanggung Jawab Teknis)
87. Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi
88. Persetujuan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab
89. Persetujuan Pergantian Kepala Cabang
90. Pencabutan Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi
91. Persetujuan Penambahan Gudang PBF Cabang
92. Persetujuan Perubahan Gudang PBF Cabang
93. Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
94. Adendum Perubahan Alamat UKOT Tanpa Pindah Lokasi;
95. Adendum Perubahan Kapasitas dan/atau Fasilitas Produksi UKOT
96. Adendum Pergantian Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian Penanggung Jawab UKOT
97. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian;
98. Surat Tugas Dokter Spesialis
99. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B
100. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B;
101. Izin Operasional Unit Transfusi Darah
102. Izin Operasional Laboratorium Klinik Madya
103. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan
104. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan
105. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan
106. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian
107. IUP Operasi Produksi untuk Penjualan
108. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
109. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
110. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
111. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati/Biofuel
112. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUJPTLS)
113. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)
114. Izin Operasi Ketenagalistrikan (IO)
115. Izin Galian di Ruas Jalan Provinsi
116. Rekomendasi Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol
117. Izin Pendirian Sekolah
118. Izin Operasional Sekolah

119. Izin Pembukaan Kompetensi Keahlian
120. Izin Penggabungan Sekolah
121. Izin Penutupan Sekolah
122. Rekomendasi Penelitian
123. Standar Pelayanan Permintaan Data
124. Standar Pelayanan Konsultasi LKPM
125. Standar Pelayanan E-Perizinan
126. Standar Pelayanan Konsultasi Pengaduan
127. Standar Pelayanan Pendampingan OSS RBA

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 15 Pebruari 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali



Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana
Pembina Utama Muda
NIP. 19631022 199108 1 001